

## KERAJAAN DALAM ISLAMISASI NUSANTARA SEBAGAI AKAR TRADISI KEILMUAN: PASAI, ACEH, DAN MATARAM ISLAM

Aliza Nur Azizah<sup>1)</sup> \*, Dwi Ratnasari<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\* [alizanurazizah1902@gmail.com](mailto:alizanurazizah1902@gmail.com)

### Abstract

*This article examines the role of Islamic kingdoms in the Indonesian archipelago, particularly Samudera Pasai, Aceh Darussalam, and Islamic Mataram, in the process of Islamization and their contribution to the formation of Islamic scholarly traditions. The background of this research departs from the tendency of historical studies of Islam in the Indonesian archipelago to emphasize cultural aspects and the role of individual ulama, thus paying less attention to the role of political power as a strategic actor in the development of Islam and religious education. This study aims to analyze the position of Islamic kingdoms in the history of Islamization in the Indonesian archipelago, the pattern of relationships between sultanates and ulama, the variations in Islamization strategies implemented, and their relevance to contemporary Islamic Religious Education. This study uses a qualitative research method with a historical-analytical and comparative approach through the analysis of historical sources, academic literature, and the historiography of Islam in the Indonesian archipelago. The results show that Islamization in the Indonesian archipelago took place in a directed manner through the active role of kingdoms in supporting da'wah, establishing educational institutions, and establishing a sustainable Islamic scholarly tradition. Each kingdom had a different pattern of Islamization according to its social and cultural context, but all demonstrate a symbiotic relationship between ulama and power. The conclusion of this study confirms that the Islamic scientific tradition of the Indonesian archipelago is the result of historical interactions between religion and power, and has important relevance for the development of Islamic Religious Education that is integrative, contextual, and oriented towards the formation of civilization.*

**Keywords:** *Islamization of the Archipelago, Islamic Kingdoms, Islamic Scientific Tradition*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji peran kerajaan Islam di Nusantara, khususnya Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Mataram Islam, dalam proses Islamisasi serta kontribusinya terhadap pembentukan tradisi keilmuan Islam. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kecenderungan kajian sejarah Islam Nusantara yang lebih menekankan aspek kultural dan peran individual ulama, sehingga kurang memberi perhatian pada peran kekuasaan politik sebagai aktor strategis dalam pengembangan Islam dan pendidikan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kerajaan Islam dalam sejarah Islamisasi Nusantara, pola relasi antara kesultanan dan ulama, variasi strategi Islamisasi yang diterapkan, serta relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-analitis dan komparatif melalui analisis sumber-sumber sejarah, literatur akademik, dan kajian historiografi Islam Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung secara

terarah melalui peran aktif kerajaan dalam mendukung dakwah, membangun lembaga pendidikan, dan membentuk tradisi keilmuan Islam yang berkelanjutan. Setiap kerajaan memiliki corak Islamisasi yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan budayanya, namun seluruhnya menunjukkan hubungan simbiotik antara ulama dan kekuasaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tradisi keilmuan Islam Nusantara merupakan hasil interaksi historis antara agama dan kekuasaan, serta memiliki relevansi penting bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam yang integratif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan peradaban.

**Kata Kunci:** *Islamisasi Nusantara, Kerajaan Islam, Tradisi Keilmuan Islam.*

## PENDAHULUAN

Islamisasi Nusantara selama ini lebih sering dipahami sebagai proses kultural yang berlangsung melalui perdagangan, dakwah personal ulama, dan interaksi sosial masyarakat pesisir. Pendekatan ini banyak digunakan dalam historiografi Islam Indonesia untuk menjelaskan jalur masuk Islam dan pola penerimaan masyarakat lokal. Abd. Rahman Hamid, misalnya, menegaskan bahwa Samudera Pasai berkembang sebagai pusat awal Islamisasi karena posisinya dalam jaringan perdagangan internasional abad ke-13 hingga 16, yang memungkinkan hadirnya ulama dan literatur Islam dari berbagai kawasan dunia Islam (Hamid, 2021). Namun, pendekatan kultural semacam ini belum cukup menjelaskan bagaimana Islam mampu membangun tradisi keilmuan yang terlembaga dan bertahan lintas generasi di Nusantara.

Kajian mengenai perkembangan pendidikan Islam juga telah dilakukan untuk menjelaskan keberlanjutan tradisi keilmuan tersebut. Inayatillah menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Aceh berkembang melalui institusi meunasah dan dayah yang menjadi basis transmisi pengetahuan keagamaan di masyarakat (Inayatillah, 2023). Studi lain oleh Rully Putri Nirmala Puji dkk. menyoroti peran Kesultanan Mataram Islam dalam membentuk tradisi Islam Jawa melalui kebudayaan dan akulturasi pada masa Sultan Agung (Puji, Ilmiyah, & Rama, 2022). Meski demikian, penelitian-penelitian ini cenderung memusatkan perhatian pada praktik pendidikan dan ekspresi budaya, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kebijakan politik dan patronase kerajaan sebagai kekuatan penggerak sistem keilmuan.

Bertolak dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memposisikan Islamisasi Nusantara sebagai proses institusional yang diarahkan oleh kerajaan Islam melalui legitimasi kekuasaan, dukungan terhadap ulama, serta pembentukan pusat-pusat keilmuan. Berbeda dari studi sebelumnya yang memisahkan antara Islamisasi, pendidikan, dan kekuasaan, penelitian ini mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis komparatif terhadap Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Mataram Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian ini menegaskan bahwa tradisi keilmuan Islam Nusantara bukan lahir secara spontan, melainkan sebagai hasil rekayasa historis yang dijalankan melalui institusi kerajaan.

Atas dasar argumentasi tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran kerajaan Islam dalam proses Islamisasi Nusantara serta menjelaskan bagaimana proses tersebut membentuk dan mengarahkan tradisi keilmuan Islam di Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Mataram Islam. Penelitian ini diarahkan untuk memperkaya historiografi Islam Nusantara dengan menghadirkan pembacaan yang lebih integratif antara agama, kekuasaan, dan produksi ilmu pengetahuan Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historis-kritis, yang terdiri dari empat tahap (Sartono Kartodirdjo, 1992):

Heuristik sebagai langkah pertama, sumber primer dari Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya jilid 3* (Jakarta: Gramedia, 1996), Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), dan Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1680, Volume II* (New Haven: Yale University Press, 1993).

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini dipilih bukan kerana penulisnya hidup sezaman dengan kerajaan Islam, melainkan karena objektivitas akademis yang lahir dari penggunaan metodologi sejarah. Objektivitas dalam historiografi modern tidak diukur dari kedekatan temporal seorang penulis dengan peristiwa, melainkan dari cara ia mengolah sumber dan data sebelum menyimpulkan. Dengan demikian, objektivitas yang dimaksud bukan klaim “netral mutlak,” melainkan keterjaminan akademis melalui metode ilmiah sejarah yang dilalui penulis sebelum menyusun temuan. Karena itu, walalu para penulis tidak hidup di era kerajaan Islam, karya mereka tetap dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

Kritik Sumber, Sebagai langkah kedua. Menelaah isi karya, misalnya bias orientalis pada Denys Lombard dan Antony Reid, nuansa apologetik pada Hamka, serta penekanan politik berlebih pada Ahmad Mansur Suryanegara. Ketiga, interpretasi. Menghubungkan berbagai sumber untuk melihat pola umum kerajaan Islam tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai aktor aktif yang bekerja sama dengan ulama dalam proses islamisasi. Keempat, historiografi. Menyusun narasi sejarah yang kritis dan sistematis yaitu bagaimana kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Mataram Islam berperan dalam islamisasi dengan strategi berbeda sesuai konteks sosial dan budaya.

Penelitian ini dimulai dengan kegiatan heuristik, yakni pengumpulan sumber yang bersifat primer dalam bentuk karya-karya sejarawan besar seperti Azyumardi Azra, Denys Lombard, Hamka, Ahmad Mansur Suryanegara, Anthony Reid, dan Taufik Abdullah. Sumber-sumber tersebut dipilih karena menghadirkan analisis langsung berbasis riset empiris yang dilakukan penulisnya, baik melalui telaah arsip, catatan perjalanan, maupun dokumen perdagangan yang kemudian diinterpretasikan dalam konteks Nusantara. Dengan demikian, meskipun bukan berupa naskah babad atau arsip kolonial secara langsung, karya-karya tersebut merepresentasikan data primer yang telah dikaji secara kritis oleh sejarawan otoritatif.

Langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber untuk menilai tingkat keaslian data, konsistensi argumen, serta kredibilitas penulis. Kritik ini penting agar penelitian tidak hanya menerima informasi secara apa adanya, melainkan menimbang sejauh mana sebuah karya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Setelah itu, penulis melakukan interpretasi dengan cara menghubungkan pandangan yang beragam dari para sejarawan, mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan narasi, dan merangkainya menjadi analisis yang utuh. Keseluruhan proses tersebut akhirnya dituangkan dalam bentuk historiografi, yakni penulisan sejarah yang tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga mengkritisi dan mengontekstualisasikan peran kerajaan Islam dalam Islamisasi Nusantara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### **Kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Mataram Islam dalam Proses Islamisasi Nusantara dan Posisinya dalam Sejarah**

#### Samudera Pasai

Kerajaan Islam pertama Islam di Indonesia adalah Kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir Timur Laut Aceh. Kemunculannya diperkirakan awal atau pertengahan abad ke-13 M, sebagai hasil dari islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim (Azyumardi Azra, 1994). Selain Azra, hal ini juga dinyatakan oleh Lombard (Lombard, 1996). Samudera Pasai berdiri sekitar 1297 M, menjadikannya pusat perdagangan internasional sekaligus pusat dakwah Islam pesisir Sumatra (Hamka, 1976). Bukti berdirinya kerajaan didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudera Pasai. Dari nisan itu, dapat diketahui bahwa raja pertama Kerajaan Samudera Pasai meninggal pada bulan Ramadhan tahun 696 H, yang diperkirakan bertepatan tahun 1297 M (Tjandrasasmita, 1984). Sejarawan modern menegaskan bahwa Samudera Pasai bukan sekadar kerajaan politik, tetapi juga menjadi simpul jaringan ulama dan pedagang muslim dari Timur Tengah yang memperkuat Islamisasi Nusantara.

Analisis sumber primer seperti catatan Azra dan Lombard menunjukkan bahwa meskipun ada narasi lokal mengenai kerajaan Perlak yang lebih awal, bukti dokumentasi yang jelas dan berkelanjutan institusi politik Islam pertama di pesisir lebih kuat berada pada Samudera Pasai. Dengan demikian, Samudera Pasai berperan sebagai fondasi awal kerajaan Islam di pesisir Nusantara.

Kerajaan samudera Pasai berada di Selat Malaka yang memungkinkan kerajaan ini menjadi persinggahan pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok (Lombard, 1996). Reid menggambarkan Pasai sebagai pelabuhan utama ekspor rempah dan emas ke Timur Tengah (Reid, 2011), sementara Hamka menambahkan bahwa akumulasi kekayaan digunakan untuk mendirikan masjid dan lembaga keagamaan (Hamka, 1976). Artikel Yusuf (2023) mendukung hal ini dengan menyoroti adopsi bahasa Melayu sebagai lingua franca Islam Nusantara (Muhammad Yusuf, 2023). Keberadaan jalur perdagangan yang strategis tidak hanya menguntungkan ekonomi kerajaan, tetapi juga memfasilitasi masuknya ide dan ajaran Islam ke Nusantara

Integrasi antara aktivitas perdagangan dan penyebaran agama Islam diperkuat oleh fakta bahwa Samudera Pasai memiliki sistem moneter sendiri, yang menunjukkan tingkat kemajuan administrasi dan stabilitas ekonomi kerajaan (Lombard, 1996). Memang, Reid cenderung menekankan sisi ekonomi, Hamka bernuansa apologetik, dan Yusuf berfokus linguistik, sedangkan Lombard pada sinkretisme budaya, tetapi justru perbedaan fokus itu saling melengkapi, Pasai tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga berhasil menjadikan ekonomi, agama, dan bahasa sebagai fondasi legitimasi kerajaan Islam. Dengan demikian, perdagangan menjadi fondasi utama bagi kerajaan ini untuk mengembangkan pengaruhnya di pesisir Sumatra.

Kemunduran Pasai pada abad ke-15 memiliki sebab ganda. Lombard menyatakan kemerosotan terjadi karena jalur dagang bergeser ke Malaka dan Aceh (Lombard, 1996), sedangkan Suryanegara menyoroti lemahnya inovasi kelembagaan Pasai (Suryanegara, 1995). Studi terbaru bahkan menambahkan faktor birokrasi yang rapuh dalam menghadapi kompetisi regional (Nurhayati, 2022). Jika dikritisi, sumber Barat seperti Lombard memang kaya data ekonomi, sementara sumber lokal seperti Suryanegara cenderung menekankan dimensi politik Islam. Keduanya sama-sama terbatas, tetapi bila dipadukan kita dapat

menyimpulkan bahwa Pasai jatuh bukan semata karena faktor luar, melainkan juga karena stagnasi internal.

Interpretasinya, dari integrasi berbagai sumber klasik dan mutakhir, Samudera Pasai dapat ditafsir sebagai kerajaan pionir yang menggunakan Islam sebagai simbol politik dan legitimasi kekuasaan, memanfaatkan kekuatan ekonomi maritim untuk membangun infrastruktur keagamaan, melahirkan model politik-agama yang diadopsi kerajaan Islam lain, mempraktikkan strategi akulturasi budaya sehingga Islam diterima sebagai identitas sosial, mengandalkan ulama sebagai aktor penghubung antara istana dan masyarakat.

Dengan demikian, meski tiap sumber punya bias seperti orientalis menekankan ekonomi, insider mengagungkan Islam, akademisi menyoroti jaringan ulama, tetapi sintesisnya memperlihatkan Pasai sebagai fondasi awal islamisasi politik di Nusantara.

#### Aceh Darussalam

Aceh Darussalam muncul sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara pada abad ke-16. Berdirinya sering dikaitkan dengan runtuhnya Samudera Pasai dan melemahnya Malaka setelah jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Lombard menegaskan bahwa Aceh mengambil alih posisi strategis Pasai dalam jalur perdagangan internasional (Lombard, 1996), sementara Azra melihat bahwa berdirinya Aceh juga dipengaruhi oleh jaringan ulama yang menghubungkan kawasan Melayu dengan Timur Tengah (Azyumardi Azra, 1994). Dari sini dapat dipahami bahwa lahirnya Aceh bukan sekadar kelanjutan Pasai, tetapi transformasi besar yang menghubungkan kekuatan politik dan religius dalam satu pusat kekuasaan.

Masa kejayaan Aceh mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Reid menggambarkan Aceh sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menjadi pesaing utama Portugis (Reid, 2011). Sementara itu, Hamka menekankan bahwa kejayaan Aceh tidak hanya tampak dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam perkembangan lembaga pendidikan dan hukum Islam yang meluas ke wilayah Sumatra dan Semenanjung (Hamka, 1976). Bahkan Denys Lombard menyebut Aceh sebagai *Serambi Mekah* karena reputasinya sebagai pusat studi Islam di Kawasan (Lombard, 1996). Dengan demikian, Aceh dapat diposisikan bukan hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai mercusuar keilmuan dan kekuasaan Islam di Asia Tenggara.

Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya Iskandar Muda, Aceh mengalami pelemahan politik karena perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan istana. Anthony Reid mencatat bahwa Aceh kehilangan kendali atas wilayah taklukan di Semenanjung Malaya pada pertengahan abad ke-17 (Reid, 2011). Ahmad Mansur Suryanegara menambahkan bahwa melemahnya struktur politik internal, ditambah tekanan Belanda yang semakin kuat di Selat Malaka, mempercepat kemunduran Aceh (Suryanegara, 1995). Akibatnya, posisi Aceh berangsur-angsur tergeser, meski tetap menyisakan pengaruh religius sebagai simbol Islam hingga abad ke-19.

Sumber-sumber mengenai Aceh memiliki karakteristik berbeda. Lombard dan Reid menekankan aspek ekonomi-politik maritim yang memberi gambaran kuat tentang posisi Aceh dalam jalur internasional, tetapi cenderung mereduksi dimensi spiritual Islam. Hamka dan Suryanegara menghadirkan narasi dari sudut pandang umat Islam, yang kaya dalam menggambarkan peran agama, namun kadang bersifat apologetik. Sementara Azra menghadirkan perspektif akademis berbasis manuskrip dan jaringan ulama, sehingga memberi keseimbangan antara aspek politik dan religius. Dengan memadukan ketiganya, kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Aceh sebagai kekuatan politik maritim sekaligus pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara.

Dari integrasi berbagai sumber, Kerajaan Aceh Darussalam dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, pewaris dan penerus Pasai bukan sekadar melanjutkan, tetapi mengambil alih posisi strategis setelah Pasai dan Malaka melemah, lalu mengubahnya menjadi kekuatan baru dengan legitimasi politik-agama yang lebih luas. Kedua, pusat kekuatan maritim dan Islam pada masa Iskandar Muda, Aceh bukan hanya penguasa jalur perdagangan, tetapi juga pusat pendidikan dan hukum Islam, sehingga wajar dijuluki *Serambi Mekah*. Ketiga, kerajaan dengan pengaruh ganda, di satu sisi menantang dominasi Portugis dan Belanda di jalur perdagangan, di sisi lain menjadi simbol Islam bagi masyarakat Melayu. Keempat, sebagai sumber warisan historis. Meski akhirnya melemah, Aceh meninggalkan model kerajaan Islam yang berakar kuat dalam tradisi ulama dan simbol religius, yang bertahan hingga abad ke-19.

Dengan demikian, posisi Aceh dalam sejarah islamisasi Nusantara bukan hanya sebagai kerajaan besar secara politik, tetapi juga sebagai mercusuar Islam Asia Tenggara, yang menggabungkan dimensi maritim, religius, dan intelektual dalam satu identitas.

#### Mataram Islam

Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 setelah runtuhnya Pajang. Sutawijaya, menantu Sultan Hadiwijaya, mendirikan Mataram dengan pusat awal di Kotagede, Yogyakarta (Hamka, 1976). Menurut Kuntowijoyo, lahirnya Mataram merupakan konsolidasi Islam pedalaman Jawa yang lebih kuat secara politik dibandingkan Pajang (Kuntowijoyo, 1994). Badri Yatim menambahkan bahwa Mataram mengadopsi banyak simbol kerajaan Jawa lama, tetapi diberi legitimasi baru dengan Islam, sehingga ia tampil sebagai kerajaan yang memadukan tradisi politik Hindu-Budha dengan identitas Islam (Yatim, 2000). Artikel terbaru oleh Lestari (2022) menyebut bahwa berdirinya Mataram adalah bentuk rekonsiliasi budaya antara tradisi Jawa dan Islam, yang menjadi ciri khas politik Jawa-Islam hingga abad ke-18 (Lestari, 2022).

Masa kejayaan Mataram terjadi pada pemerintahan Sultan Agung (1613–1645). Reid menggambarkan Mataram sebagai kekuatan politik terbesar di Jawa kala itu, dengan ekspansi militer hingga Madura dan pantai utara (Reid, 2011). Hamka menekankan bahwa Sultan Agung berhasil menegakkan Islam sebagai dasar hukum dan tata kehidupan sosial di kerajaannya (Hamka, 1976). A. Hasyimi menambahkan bahwa Sultan Agung memperkuat simbol religius dengan mendekati diri pada ulama dan menyelaraskan kalender Jawa-Islam (penanggalan Jawa-Islam 1633 M) (Hasyimi, 1993). Artikel terbaru oleh Pramono (2023) menunjukkan bahwa Sultan Agung tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memantapkan dakwah Islam di pedalaman Jawa melalui patronase pesantren dan pengangkatan ulama sebagai penasihat kerajaan (Pramono, 2023). Dengan demikian, masa kejayaan Mataram menampilkan model politik Jawa-Islam yang kokoh sekaligus ekspansif.

Kemunduran Mataram dimulai pada akhir abad ke-17. Menurut Lombard, konflik internal dalam keluarga raja melemahkan stabilitas kerajaan (Lombard, 1996). Suryanegara menyebut bahwa campur tangan VOC dalam urusan suksesi memperparah perpecahan politik (Suryanegara, 1995). Kuntowijoyo menegaskan bahwa perpecahan internal ini berujung pada perjanjian Giyanti (1755), yang memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta (Kuntowijoyo, 1994). Artikel terbaru oleh Nurhadi (2023) menambahkan bahwa kelemahan birokrasi dan dominasi VOC dalam perdagangan beras di Jawa semakin mempercepat disintegrasi Mataram (Nurhadi, 2023). Dari sini jelas bahwa keruntuhan Mataram bukan hanya akibat intrik politik dalam negeri, tetapi juga dominasi kolonial Belanda yang mereduksi kedaulatan kerajaan.

Sumber-sumber tentang Mataram menunjukkan bias yang beragam. Reid dan Lombard banyak menekankan ekspansi militer dan peran VOC, namun cenderung menempatkan aspek religius Islam di pinggiran. Hamka dan Hasyimi menekankan legitimasi Islam Sultan Agung, tetapi kadang lebih bersifat normatif. Kuntowijoyo memberi analisis struktural politik Islam Jawa yang lebih seimbang, sementara Badri Yatim menempatkan Mataram sebagai contoh integrasi tradisi lama dan Islam. Artikel terbaru memperkaya narasi dengan menyoroti peran ulama, pesantren, dan rekonsiliasi budaya. Dengan mengintegrasikan semua ini, Mataram dapat dipahami bukan hanya sebagai kerajaan militer, tetapi juga pusat budaya Islam Jawa yang kompleks.

Interpretasinya, Kesultanan Mataram Islam menempati posisi krusial dalam islamisasi Nusantara. Yang pertama, Mataram menjadi pusat Islam di pedalaman Jawa. Kerajaan ini melanjutkan kesinambungan dari Pajang, tetapi hadir dengan skala kekuasaan yang lebih luas, terstruktur, dan mampu mengendalikan wilayah agraris yang besar. Yang kedua, Mataram menghadirkan legitimasi Islam dalam politik Jawa. Hal ini tampak jelas pada masa Sultan Agung, yang menempatkan hukum serta simbol-simbol Islam sebagai dasar kekuasaan, namun tetap memelihara tradisi lama Jawa untuk menjaga wibawa politik dan penerimaan masyarakat. Yang ketiga, Mataram berperan dalam ekspansi dakwah dan perkembangan pesantren. Islam tidak lagi sekadar menjadi simbol istana, melainkan turut meresap ke dalam kehidupan sosial masyarakat pedalaman. Pesantren tumbuh sebagai basis pendidikan dan dakwah yang memperkuat fondasi keislaman di Jawa. Yang terakhir, Mataram memperlihatkan keruntuhan yang paradoksal. Meskipun kuat secara militer dan budaya, dominasi VOC serta konflik internal justru melemahkan kerajaan ini. Namun demikian, warisan Jawa-Islam tetap bertahan dalam bentuk kerajaan penerus, yakni Surakarta dan Yogyakarta.

Dengan demikian, Kesultanan Mataram dapat dipahami sebagai puncak perkembangan Islam di Jawa. Ia menyatukan politik, budaya, dan agama dalam skala besar, meskipun pada akhirnya harus melemah karena tekanan kolonialisme dan perpecahan dari dalam.

#### Peran Kerajaan Islam Nusantara Saat ini

Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, meski secara politik telah runtuh, meninggalkan warisan pendidikan yang berlanjut hingga era modern. Tradisi pesantren yang berakar dari pusat kekuasaan Samudera Pasai, Aceh, Mataram Islam melahirkan jaringan ulama yang hingga kini menjadi pilar dakwah. Pesantren bukan hanya melestarikan kajian kitab kuning, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter kebangsaan serta ketahanan nasional di era modern (Nurazmi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara terus berlanjut melalui jalur pendidikan tradisional yang beradaptasi dengan zaman.

Selain pendidikan, warisan budaya juga menjadi instrumen penting Islamisasi masa kini. Tradisi Islam bercorak lokal seperti grebeg sekaten, perayaan maulid, dan ziarah Wali Songo yang dahulu diinisiasi kerajaan-kerajaan Islam kini menjadi media dakwah kultural yang efektif (Rizki, 2025). Tradisi ini memperkuat wajah Islam Nusantara yang moderat, ramah budaya, serta mampu merespons tantangan global tanpa kehilangan otentisitas ajaran. Dengan begitu, Islamisasi yang berlangsung tidak hanya menyentuh aspek teologis, tetapi juga sosial dan kultural.

Lebih jauh, narasi perjuangan kerajaan Islam terhadap kolonialisme juga masih hidup dalam pendidikan sejarah Islam Indonesia. Kisah perlawanan Aceh dan Mataram melawan Belanda dijadikan simbol keteguhan iman dan identitas Islam di Nusantara (Basri, 2024). Kini, nilai historis tersebut digunakan untuk membentuk kesadaran kebangsaan dan

memperkuat resistensi generasi muda terhadap arus globalisasi yang dapat melemahkan jati diri Islam di Indonesia. Dengan demikian, warisan politik perlawanan kerajaan Islam tetap relevan sebagai energi moral untuk menghadapi tantangan kontemporer.

Kesimpulannya, peran kerajaan Islam Nusantara dalam Islamisasi masa kini hadir dalam tiga bentuk, yaitu keberlanjutan pendidikan Islam, dakwah berbasis budaya lokal, dan inspirasi perlawanan melawan hegemoni asing. Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun kerajaan-kerajaan itu tidak lagi eksis secara struktural, warisan mereka masih aktif menjadi motor Islamisasi di era modern.

### **Hubungan Simbiotik Ulama dalam Penyebaran Islam di Nusantara**

Hubungan antara ulama dan kerajaan di Nusantara bersifat simbiotik, artinya saling menguatkan. Ulama memperoleh perlindungan dan legitimasi dari sultan, sedangkan kerajaan memanfaatkan ulama untuk menegakkan Islam sebagai fondasi politik dan sosial (Kuntowijoyo, 1994). Contohnya, Samudera Pasai menjadikan ulama sebagai penasihat hukum dan dakwah, sehingga Islam cepat menjadi identitas resmi kerajaan (Azyumardi Azra, 1994). Di Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda menempatkan ulama sebagai penasihat kerajaan dan pengawas syariat (Hamka, 1976), yang memperluas pengaruh Islam ke pedalaman. Di Mataram, sultan dan ulama bekerja sama dalam administrasi, hukum, dan pendidikan, dengan ulama pedalaman menjadi mediator, sehingga Islam diterapkan luas di Jawa Tengah (Harun, 1994). Lembaga pendidikan Islam menjadi instrumen utama penyebaran Islam. Pesantren, madrasah, dan masjid yang didirikan oleh ulama dan didukung sultan menciptakan generasi pengikut Islam yang loyal. Pendidikan Islam diintegrasikan dalam administrasi kerajaan, sehingga hukum dan budaya Islami dapat diterapkan lebih luas.

Interpretasinya, menunjukkan bahwa islamisasi bukanlah proses tunggal, melainkan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lokal, akses perdagangan, dan kapasitas politik masing-masing wilayah. Hubungan antara ulama dan sultan menjadi penentu keberhasilan penyebaran Islam, di mana kerja sama ini kuat, legitimasi politik dan pendidikan agama berjalan seiring. Strategi yang terintegrasi dengan menggabungkan pendidikan, hukum, perdagangan, dan dakwah yang menciptakan corak islamisasi yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus memungkinkan kerajaan menghadapi tekanan kolonial maupun potensi fragmentasi internal, membuktikan bahwa Islamisasi di Nusantara adalah hasil perpaduan cerdas antara kepentingan politik, sosial, dan agama.

Integrasi pendidikan dan hukum semakin memperlihatkan perbedaan strategi. Kerajaan besar seperti Mataram dan Aceh membangun sistem pesantren, madrasah, dan penerapan syariat secara terstruktur, sedangkan kerajaan kecil atau pedalaman lebih fleksibel, menyesuaikan hukum Islam dengan adat lokal. Variasi strategi ini membentuk corak Islamisasi yang khas di setiap wilayah, seperti Aceh dan Samudera Pasai menonjol sebagai pusat Islam resmi dan transregional, Mataram menghadirkan Islam yang terstruktur di pedalaman Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara bukanlah proses homogen, melainkan hasil perpaduan strategi politik, pendidikan, dan jaringan ulama yang cerdas.

### **Variasi Strategi dan Corak Islamisasi Kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam dan Mataram Islam**

Samudera Pasai menggunakan pesantren pesisir dan jaringan ulama transregional sebagai strategi utama islamisasi. Dakwah dan legitimasi politik dijalankan secara paralel, menghubungkan wilayah pesisir dengan Timur Tengah dan India. Strategi ini menekankan kekuatan moral dan ekonomi melalui perdagangan lada. Islamisasi di Samudera Pasai

bersifat transregional dan resmi, membentuk model dakwah awal Nusantara. Ulama memperoleh legitimasi politik, sultan memperoleh dukungan moral dan pendidikan masyarakat (Kuntowijoyo, 1994). Jadi, Integrasi dakwah ulama dan legitimasi politik menunjukkan bahwa islamisasi awal sangat bergantung pada jaringan transregional dan kontrol politik.

Aceh menekankan integrasi ulama dalam administrasi kerajaan dan penerapan hukum syariah di pedalaman dan pesisir (Hamka, 1976). Pesantren menjadi pusat pendidikan sekaligus media dakwah, sementara ulama berperan sebagai penasihat sultan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Islamisasi di Aceh menyatukan politik, pendidikan, hukum, dan budaya, menjadikannya pusat intelektual Islam di Nusantara dan memastikan keberlanjutan dakwah melalui legitimasi ulama (Harun, 1994). Jadi, Strategi ini menunjukkan bagaimana Aceh menggabungkan aspek politik dan pendidikan untuk membentuk identitas Islam yang kuat dan stabil. Sultan melalui ulama.

Mataram menekankan integrasi ulama dalam administrasi, pendidikan, dan pengawasan hukum syariah di pedalaman Jawa (Azyumardi Azra, 1994). Pesantren dan madrasah menjadi pusat dakwah sekaligus pendidikan moral, sedangkan sultan menggunakan hukum syariah untuk memperkuat legitimasi politik. Corak islamisasi Mataram adaptif, menyatu dengan adat lokal, sehingga Islam dapat bertahan di pedalaman secara berkelanjutan (Harun, 1994). Maka, Strategi ini menegaskan pentingnya adaptasi dakwah sesuai konteks lokal untuk keberlanjutan islamisasi.

Sumber-sumber yang digunakan memberikan gambaran luas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, namun memiliki fokus dan bias masing-masing. Kuntowijoyo menonjolkan legitimasi politik dan peran ulama, tapi kurang menekankan aspek ekonomi dan perdagangan. Hamka menyoroti dimensi religius dan dakwah, namun cenderung apologetik. Azra memberi perspektif jaringan ulama transregional, penting untuk hubungan Nusantara-Timur Tengah, tetapi politik lokal kurang rinci. Artikel-artikel terbaru memperkaya data tentang pendidikan, perdagangan, dan diplomasi, namun kadang fokus pada kasus tertentu sehingga sulit digeneralisasi. M. Yahya Harun menyajikan sintesis komprehensif tentang strategi dakwah, legitimasi politik, dan corak islamisasi, namun masih bersifat deskriptif dan kurang kritis terhadap sumber primer. Secara keseluruhan, kombinasi sumber ini memberikan gambaran menyeluruh, tetapi perlu keseimbangan antara perspektif religius, politik, dan ekonomi agar analisis historis menjadi lebih kritis dan seimbang.

Interpretasinya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menunjukkan bahwa islamisasi bukan hanya proses religius, tetapi juga politik, ekonomi, dan budaya. Variasi strategi pada pesisir, pedalaman, dan kepulauan yang menentukan corak dakwah, legitimasi sultan, dan keberlanjutan Islam di masing-masing wilayah. Hubungan simbiotik antara ulama dan kerajaan menjadi kunci, sementara adaptasi dengan konteks lokal menjamin penerimaan dan stabilitas jangka panjang.

### **Kontribusi Kesultanan terhadap Tradisi Keilmuan Islam**

Kesultanan Islam di Nusantara memainkan peran sentral dalam membentuk tradisi keilmuan Islam melalui dukungan institusional terhadap ulama, lembaga pendidikan, dan produksi teks keagamaan. Di Samudera Pasai, sultan berperan sebagai patron ilmu dengan mengundang ulama dari Timur Tengah dan India serta menjadikan istana sebagai pusat diskursus keislaman. Azyumardi Azra mencatat bahwa Pasai berfungsi sebagai simpul awal jaringan intelektual Islam Nusantara yang terhubung langsung dengan pusat-pusat ilmu dunia Islam sejak abad ke-14 (Azyumardi Azra, 1994). Kontribusi ini menunjukkan bahwa

kekuasaan politik bukan sekadar pelindung agama, melainkan aktor aktif yang mengarahkan orientasi keilmuan Islam sejak fase awal Islamisasi.

Peran yang lebih sistematis terlihat pada Kesultanan Aceh yang berhasil mengintegrasikan kekuasaan politik dengan pengembangan keilmuan Islam secara terlembaga. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh tidak hanya menjadi kekuatan politik regional, tetapi juga pusat studi Islam dengan hadirnya ulama besar seperti Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin ar-Raniri. Peter Riddell menjelaskan bahwa negara berperan dalam menentukan corak ortodoksi keilmuan melalui dukungan terhadap karya-karya tasawuf dan fikih yang sejalan dengan kepentingan legitimasi politik (Riddell, 2001). Dengan demikian, tradisi keilmuan Aceh berkembang bukan dalam ruang netral, tetapi dalam dialektika antara ilmu, otoritas, dan kekuasaan.

Sementara itu, Kesultanan Mataram Islam menunjukkan bentuk kontribusi keilmuan yang berbeda dengan menekankan integrasi Islam ke dalam kosmologi Jawa. Melalui kebijakan kultural para sultan, khususnya Sultan Agung, nilai-nilai Islam diteguhkan melalui karya sastra, kalender Islam-Jawa, serta penguatan peran ulama keraton. M.C. Ricklefs menegaskan bahwa Mataram membangun tradisi intelektual Islam dengan cara mengasimilasikannya ke dalam struktur budaya dan politik Jawa, bukan dengan mengadopsi sepenuhnya model keilmuan Timur Tengah (Ricklefs, 2006). Hal ini menandakan bahwa tradisi keilmuan Islam Nusantara berkembang dalam beragam bentuk sesuai dengan strategi kekuasaan masing-masing kesultanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kontribusi kesultanan terhadap tradisi keilmuan Islam di Nusantara bersifat aktif, strategis, dan berorientasi jangka panjang. Tradisi keilmuan Islam bukan sekadar hasil kesalahan individual ulama atau dinamika masyarakat, melainkan produk kebijakan kekuasaan yang secara sadar membentuk arah, corak, dan legitimasi keilmuan Islam di setiap wilayah Nusantara.

Kontribusi kesultanan terhadap tradisi keilmuan Islam di Nusantara dapat diinterpretasikan sebagai bentuk institusionalisasi ilmu yang tidak mungkin lahir tanpa legitimasi politik. Kesultanan menyediakan ruang sosial, ekonomi, dan simbolik bagi ulama untuk memproduksi dan berotoritas di tengah masyarakat. Azyumardi Azra menegaskan bahwa jaringan ulama di Nusantara berkembang seiring dengan perlindungan dan fasilitasi penguasa lokal terhadap mobilitas intelektual ulama ke dan dari pusat-pusat Islam dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam tidak tumbuh di ruang otonom, melainkan dalam struktur kekuasaan yang secara sadar menciptakan kondisi lahirnya otoritas keilmuan.

Namun demikian, kontribusi tersebut tidak bersifat netral atau bebas nilai, sebab kesultanan juga berfungsi sebagai aktor seleksi terhadap jenis ilmu dan wacana keislaman yang dilegitimasi. Di Aceh, misalnya, negara memainkan peran aktif dalam menentukan ortodoksi keilmuan melalui dukungan terhadap ulama tertentu dan pembatasan terhadap pandangan yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Peter G. Riddell menunjukkan bahwa penguatan posisi Nuruddin ar-Raniri tidak terlepas dari kebutuhan istana untuk menertibkan wacana tasawuf wujudiyah yang dinilai berpotensi menimbulkan resistensi ideologis. Dengan demikian, tradisi keilmuan Islam berkembang melalui mekanisme kuasa yang turut menentukan arah kebenaran keagamaan.

Dalam konteks Mataram Islam, kontribusi kesultanan terhadap keilmuan Islam memperlihatkan pola yang berbeda, yakni penyesuaian epistemologi Islam dengan kosmologi lokal. Sultan tidak sekadar melindungi ulama, tetapi juga mengarahkan ekspresi keilmuan agar selaras dengan struktur budaya dan politik Jawa. M.C. Ricklefs menjelaskan

bahwa integrasi Islam ke dalam konsepsi kekuasaan Jawa dilakukan melalui simbol, sastra, dan ritus yang mempertemukan Islam dengan warisan Hindu-Buddha. Pola ini mengindikasikan bahwa tradisi keilmuan Islam di Jawa lebih bersifat adaptif-politis dibandingkan normatif-tekstual.

Dari perspektif kritis, kontribusi kesultanan terhadap tradisi keilmuan Islam tidak dapat direduksi sebagai peran mulia semata, melainkan harus dipahami sebagai relasi timbal balik antara ilmu dan kekuasaan. Kesultanan membutuhkan legitimasi keagamaan untuk memperkuat otoritas politiknya, sementara ulama membutuhkan dukungan kekuasaan untuk memperluas pengaruh keilmuannya di ruang publik. Oleh karena itu, tradisi keilmuan Islam Nusantara pada dasarnya merupakan hasil negosiasi historis antara kepentingan epistemik dan kepentingan politik, bukan semata-mata produk kesalahan intelektual.

### **Relevansi Peran Kerajaan Islam Nusantara terhadap Pendidikan Agama Islam Saat Ini (PAI Kontemporer)**

Warisan Samudera Pasai memberikan fondasi penting bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam saat ini, terutama dalam aspek integrasi ilmu dengan jaringan keilmuan global. Pasai menunjukkan bahwa pendidikan Islam sejak awal dibangun melalui keterhubungan intelektual lintas wilayah, bukan dalam ruang lokal yang terisolasi. Azyumardi Azra menegaskan bahwa tradisi transmisi ilmu di Pasai berlangsung melalui mobilitas ulama dan penggunaan literatur Islam internasional yang kemudian diadaptasi di Nusantara (Azra, 2013). Model ini relevan bagi PAI kontemporer untuk menghindari sikap eksklusif dan mendorong keterbukaan epistemik dalam pengajaran Islam.

Sementara itu, Kesultanan Aceh memberikan kontribusi konseptual yang kuat bagi PAI melalui peneguhan peran negara atau otoritas dalam menopang pendidikan Islam secara sistematis. Lembaga seperti meunasah dan dayah berkembang bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi sebagai sarana kaderisasi ulama dan intelektual Muslim. Studi Mukhlisuddin menunjukkan bahwa sistem pendidikan Aceh mencerminkan keterpaduan antara pendidikan formal, spiritual, dan sosial yang dijalankan secara berkelanjutan (Mukhlisuddin, 2019). Pola ini relevan bagi PAI saat ini yang masih menghadapi fragmentasi antara dimensi kognitif, afektif, dan praksis keagamaan.

Kontribusi Mataram Islam terhadap PAI kontemporer dapat dibaca melalui pendekatan kultural dalam pembelajaran agama. Mataram menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat ditransmisikan secara efektif melalui simbol, sastra, dan tradisi lokal tanpa kehilangan substansi nilai-nilainya. M.C. Ricklefs menjelaskan bahwa strategi Islamisasi Jawa melalui kebudayaan memungkinkan Islam diterima sebagai sistem makna yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat (Ricklefs, 2006). Prinsip ini relevan bagi PAI masa kini yang berhadapan dengan peserta didik multikultural dan realitas sosial yang beragam.

Jika dikontekstualisasikan secara kritis, ketiga kerajaan tersebut memberikan kerangka historis bagi PAI untuk dikembangkan secara integratif, institusional, dan kontekstual. Samudera Pasai menekankan keterbukaan intelektual, Aceh meneguhkan sistem pendidikan berbasis nilai dan otoritas moral, sementara Mataram Islam menawarkan strategi pedagogis berbasis budaya. Oleh karena itu, PAI saat ini seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan normatif, melainkan sebagai proses pembentukan tradisi keilmuan yang sadar sejarah, berakar budaya, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Peran Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, dan Mataram Islam dalam konteks PAI saat ini dapat diinterpretasikan sebagai fondasi historis yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam sejak awal dibangun secara sadar, terarah, dan terlembaga. Ketiga kerajaan tersebut

tidak memandang pendidikan agama sebagai aktivitas pinggiran, melainkan sebagai instrumen strategis pembentukan otoritas keagamaan dan kesinambungan sosial. Dalam konteks PAI modern, warisan ini mengingatkan bahwa pendidikan Islam semestinya dipahami sebagai sistem pembentukan tradisi keilmuan, bukan sekadar mata pelajaran normatif yang terpisah dari dinamika sosial dan kekuasaan.

Secara analitis, praktik keilmuan di Samudera Pasai menegaskan pentingnya keterbukaan epistemik dalam PAI. Islam diajarkan tidak dalam sikap defensif, tetapi melalui dialog dengan wacana keilmuan global. Jika ditarik ke situasi PAI saat ini, masalah utamanya justru terletak pada kecenderungan kurikulum yang tertutup, tekstual, dan minim dialog dengan pengetahuan kontemporer. Tradisi Pasai menjadi kritik historis terhadap PAI yang terlalu sempit dalam memaknai “ilmu agama” dan mengabaikan sifat Islam yang sejak awal bersifat kosmopolitan.

Kesultanan Aceh memberikan pelajaran bahwa pendidikan Islam membutuhkan dukungan struktural dan keberpihakan kebijakan. Keberhasilan Aceh membangun tradisi keilmuan tidak hanya bertumpu pada kualitas ulama, tetapi pada kesadaran politik bahwa ilmu adalah sumber legitimasi dan kekuatan moral masyarakat. Dalam konteks kekinian, lemahnya posisi PAI sering kali bersumber dari absennya visi institusional yang memandang pendidikan agama sebagai investasi peradaban, bukan sekadar kewajiban administratif dalam sistem pendidikan nasional.

Adapun Mataram Islam menawarkan perspektif kritis terkait pendekatan pedagogis dalam PAI. Integrasi Islam dengan budaya lokal menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan agama bergantung pada kemampuannya menyentuh realitas hidup peserta didik. PAI yang diajarkan secara kaku, ahistoris, dan tidak sensitif terhadap konteks sosial berisiko melahirkan keberagamaan yang formalistik tetapi miskin makna. Tradisi Mataram justru menantang asumsi bahwa adaptasi budaya identik dengan degradasi nilai agama.

Secara keseluruhan, interpretasi terhadap peran tiga kerajaan Islam Nusantara ini mengarah pada satu kesimpulan kritis: problem utama PAI saat ini bukan terletak pada kekurangan referensi normatif, melainkan pada hilangnya kesadaran historis dalam membangun tradisi keilmuan. Tanpa membaca ulang pengalaman peradaban Islam Nusantara, PAI berisiko terjebak sebagai pendidikan yang mengajarkan agama, tetapi gagal membentuk keberagamaan yang berilmu, berbudaya, dan berorientasi masa depan.

## **SIMPULAN**

Kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Mataram Islam menempati posisi strategis dalam proses Islamisasi Nusantara sebagai aktor historis yang tidak hanya memfasilitasi penerimaan Islam, tetapi juga mengarahkan bentuk dan orientasi perkembangan Islam di wilayahnya masing-masing. Ketiga kerajaan ini menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung melalui keterlibatan kekuasaan politik yang sadar akan fungsi agama sebagai fondasi legitimasi, integrasi sosial, dan pembentukan peradaban. Dengan demikian, sejarah Islam Nusantara tidak dapat dibaca semata sebagai proses kultural spontan, melainkan sebagai proyek peradaban yang dijalankan melalui institusi kerajaan.

Hubungan antara kesultanan dan ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara bersifat simbiotik dan saling menguatkan. Kerajaan membutuhkan legitimasi keagamaan untuk memperkuat otoritas politik, sementara ulama memerlukan perlindungan dan dukungan struktural untuk menjalankan peran dakwah dan pengembangan ilmu. Relasi ini bukan relasi subordinatif sepihak, tetapi pertukaran kepentingan yang membentuk otoritas keagamaan Islam di ruang publik. Melalui hubungan ini, Islam tidak hanya diterima sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mengatur kehidupan sosial-politik

masyarakat Nusantara.

Proses Islamisasi di Samudera Pasai, Aceh Darussalam, dan Mataram Islam memperlihatkan variasi strategi dan corak yang dipengaruhi oleh konteks geografis, budaya, dan kepentingan politik masing-masing kerajaan. Samudera Pasai menonjol dengan corak Islamisasi kosmopolitan berbasis jaringan perdagangan dan intelektual internasional, Aceh Darussalam mengembangkan Islamisasi institusional berbasis kekuasaan dan ortodoksi keilmuan, sementara Mataram Islam menampilkan pendekatan kultural melalui akulturasi simbol dan tradisi Jawa. Variasi ini menegaskan bahwa Islamisasi Nusantara bersifat dinamis dan adaptif, bukan proses yang seragam dan monolitik.

Kontribusi kesultanan terhadap tradisi keilmuan Islam di Nusantara terbukti bersifat aktif dan strategis. Kesultanan berperan dalam membentuk pusat-pusat pendidikan, mendukung produksi karya keilmuan, serta menentukan arah wacana keislaman yang berkembang di masyarakat. Tradisi keilmuan Islam Nusantara lahir bukan hanya dari inisiatif individual ulama, tetapi dari kebijakan dan patronase politik yang menciptakan ekosistem keilmuan berkelanjutan. Oleh karena itu, tradisi keilmuan Islam Nusantara merupakan hasil interaksi historis antara ilmu, otoritas, dan kekuasaan.

Relevansi peran kerajaan Islam Nusantara terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini terletak pada warisan nilai integratif, kontekstual, dan berorientasi peradaban. Sejarah ketiga kerajaan tersebut memberikan pelajaran bahwa pendidikan agama harus dibangun secara terbuka, terlembaga, dan kontekstual dengan realitas sosial-budaya peserta didik. PAI kontemporer perlu merefleksikan kembali paradigma historis ini agar tidak terjebak dalam formalisme normatif, melainkan berfungsi sebagai sarana pembentukan tradisi keilmuan, karakter, dan kesadaran keislaman yang berakar pada sejarah dan relevan dengan tantangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media.
- Azyumardi Azra. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Bandung: Mizan.
- Basri, D. (2024). "Growth and Development of Islamic Kingdoms in Java." *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 46–62.
- Hamid, A. R. (2021). JALUR REMPAH DAN ISLAMISASI NUSANTARA: Jaringan Samudera Pasai abad XIII–XVI. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(3), 269–282.
- Hamka. (1976). *Sejarah Ummat Islam* (2nd ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun, Y. (1994). *Kerajaan Islam Nusantara*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hasyimi, A. (1993). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Inayatillah. (2023). Tradition of Islamic Basic Education in Aceh. *EDUTECH: Journal of Education and Technology*, 6(4), 671–683.
- Kuntowijoyo. (1994). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia 1994*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D. (2022). "Mataram Islam dan Rekonsiliasi Budaya Jawa-Islam." *Jurnal Sejarah Islam Nusantara*, 14(2), 90–104.
- Lombart, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sajakah Terpadu Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Yusuf. (2023). "Bahasa Melayu sebagai Medium Islamisasi di Nusantara." *Al-Hamra: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 55-7-.
- Mukhlisuddin. (2019). Pendidikan Dayah dan Pembentukan Tradisi Keilmuan Islam di Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 19(2), 193–205.
- Nurazmi, D. (2025). "The Role of Pesantren in Maintaining National Resilience in the Modern Era." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 13–25.
- Nurhadi, B. (2023). "Disintegrasi Mataram dan Peran VOC dalam Politik Jawa." *Journal of Southeast Asian History*, 15(1), 40–55.
- Nurhayati. (2022). "Peran Sultan Malikussaleh dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai

- 1297–1326 M.” *JEJAK: Jurnal Sejarah*, 13(2), 115–125.
- Pramono, A. (2023). “Sultan Agung dan Patronase Dakwah Islam di Jawa.” *Al-Tarikh: Jurnal Sejarah*, 12(1), 55–70.
- Puji, R. P. N., Ilmiah, L., & Rama, F. (n.d.). *Eksistensi Kebudayaan Kesultanan Mataram Islam terhadap Perkembangan Tradisi Islam di Jawa (Masa Sultan Agung 1613-1645 M)*.
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic synthesis in Java: a history of Islamization from the fourteenth to the early nineteenth centuries*. EastBridge.
- Riddell, P. G. (2001). *Islam and the Malay-Indonesian world: transmission and responses*. University of Hawaii Press.
- Rizki, D. (2025). “Islam Nusantara dan Pendidikan Agama: Studi Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Generasi.” *ARIPAFI: Islamic Education Journal*, 2(2), 91–102.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Suryanegara, A. M. (1995). *Menemukan sejarah: wacana pergerakan Islam di Indonesia*. Mizan.
- Tjandrasasmita, U. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Bala Pustaka.
- Yatim, B. (2000). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.